

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap wanita merupakan salah satu isu pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih terus terjadi di seluruh dunia. Menurut hasil riset dari WHO, ditemukan bahwa 1 dari 3 atau 30% wanita di dunia pernah mengalami kekerasan di hidupnya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari seperempat populasi wanita berusia 15-49 tahun di dunia pernah mengalami kekerasan yang meliputi kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual (BBC NEWS, 2021). Akar penyebab dari kekerasan terhadap wanita ini sangat banyak. Namun, hal yang paling utama menjadi penyebabnya adalah sistem patriarki. Sistem ini memiliki suatu pandangan dimana sangat mengedepankan posisi pria daripada wanita dan menganggap bahwa wanita hanya makhluk yang lemah. Sistem patriarki ini masih banyak terjadi di seluruh dunia bahkan sudah menjadi budaya yang turun temurun. Salah satunya adalah Afghanistan. Bahkan, menurut *women, peace, and security index* pada tahun 2021 Afghanistan masuk ke urutan pertama sebagai negara yang paling tidak aman untuk wanita (NEWS, 2022).

Kekerasan wanita di Afghanistan disebabkan oleh kondisi Afghanistan yang tidak kunjung stabil dari adanya konflik yang berkepanjangan. Terutama pada saat munculnya kepemimpinan Taliban di Afghanistan. Taliban menciptakan struktur kekuasaan dan tatanan sosial di masyarakat Afghanistan. Mereka menganggap bahwa wanita hanya sebagai penjaga budaya atau kehormatan sehingga dapat digunakan sebagai keutungan komersial atau politik semata (Andani, 2022). Taliban juga menciptakan berbagai aturan dan larangan mereka sendiri yang mereka anggap sebagai hukum syariah. Aturan tersebut membatasi hak-hak wanita di Afghanistan. Pertama, aturan yang membatasi wanita dari dunia luar, seperti melarang wanita keluar dari rumah sendirian. Apabila wanita ingin keluar dari rumah, mereka hanya diperbolehkan ditemani oleh makhrum prianya. Aturan ini, diambil dari ajaran orang-orang Pashtun yang dimana memisahkan wanita dengan pria setelah mencapai masa pubertas (News Sky, 2021). Kedua, wanita di Afghanistan dipaksa untuk memakai *burqa* (semacam pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuh). *Burqa* ini dianggap sebagai penjara moral bagi wanita di Afghanistan dikarenakan adanya tekanan dan paksaan untuk menggunakannya. Ketiga, aturan mengenai pendidikan wanita di Afghanistan. Taliban melarang wanita untuk bersekolah. Aturan ini berlaku untuk wanita yang berusia diatas delapan tahun. Alasannya adalah pendidikan untuk wanita ini dianggap sebagai hal yang sia sia dikarenakan wanita dewasa pun dilarang untuk bekerja di luar rumah. Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai bentuk perlindungan harga diri wanita yang tabiatnya tidak boleh lebih dari pria (Johnson, 2018). Apabila ada yang melanggar aturan tersebut, Taliban tidak segan untuk menghukum dengan

menggunakan kekerasan, seperti dicambuk ataupun dipukul. Selain itu, adanya kepemimpinan Taliban membuat wanita hanya mendapatkan akses perawatan kesehatan level paling bawah. Hal ini menyebabkan kurangnya penanganan medis bagi perempuan sehingga menyebabkan peningkatan penderitaan dan angka kematian wanita di Afghanistan.

Pandangan patriarki sebenarnya hampir terjadi di seluruh negara. Masih banyak pandangan yang menganggap laki-laki dapat berpikir rasional, objektif, dan ilmiah sehingga disiapkan untuk memerlukan pendidikan yang nantinya dapat menjadi warga negara dan pejabat publik yang baik. Sebaliknya perempuan dianggap sebagai emosional, sensual, berpembawaan halus, dan kurang mampu bernalar yang hanya dipersiapkan untuk mengelola dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Padahal perempuan juga memerlukan pendidikan untuk mengembangkan karakter sehingga nantinya perempuan dapat berpartisipasi sebagai agen pembangunan dalam tatanan sosial yang baru. Penilaian-penilaian ini secara tidak sadar akan membawa dampak terjadinya ketimpangan kekuasaan antara pria dan wanita (Rasyidinn & Aruni, 2016). Dari ketimpangan ini munculah kegelisahan yang dialami oleh perempuan yang menganggap bahwa adanya hak-hak perempuan telah disalah artikan sehingga timbulah gerakan feminisme. Tujuan gerakan feminisme untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan atas perempuan telah tersubordinasi oleh laki-laki. Gerakan ini ingin mengubah cara berpikir perempuan serta mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki. Asumsi utama dari feminisme adalah kondisi pembagian peran antara perempuan dan laki-laki bukanlah sesuatu hal yang alami sehingga dapat diubah. Adanya ketidaksetaraan ini memunculkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap perempuan termasuk deskriminasi, pelecehan, dan kekerasan menjadikan kasus ini merupakan permasalahan global yang harus segera diatasi. Banyaknya korban dari permasalahan ini membuat banyak pihak melakukan berbagai upaya, mulai dari negara, organisasi internasional, dan organisasi non pemerintah (Azizah, 2017).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan bagi perempuan adalah dengan cara advokasi. advokasi berarti sebagai segala upaya yang dilakukan untuk merubah suatu kebijakan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang besar demi mewujudkan suatu kepentingan. Dalam hal ini, advokasi diartikan untuk mewujudkan adanya kesetaraan dan perlindungan atas hak-hak perempuan yang saat ini telah disepelekan atau diacuhkan. Tujuan dari advokasi ini nantinya untuk membentuk pendapat umum yang bukan semata mata hanya pada mempengaruhi isi kepala saja. Namun, juga dinisiasikan untuk dapat mempengaruhi isi hati. Dalam hal inilah advokasi memerlukan keterlibatan dari banyak pihak dengan berbagai macam keahlian agar advokasi yang dilakukan terorganisi secara

sistematis. Di zaman yang modern saat ini dengan berkembangnya teknologi tidak menutup kemungkinan bahwasannya advokasi dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satu gerakan feminisme sekaligus telah melakukan advokasi yang berfokus pada perjuangan hak-hak wanita adalah *One Billion Rising (OBR)*. Gerakan ini merupakan gerakan feminisme besar yang berupaya untuk mengakhiri kekerasan dan ketidaksetaraan terhadap wanita di dunia yang telah bergerak di 120 negara sejak tahun 2012. Istilah “*One Billion Rising*” berawal dari ditemukannya kondisi dimana 1 dari 3 wanita di dunia pernah mengalami kekerasan di dalam hidupnya. Hal ini berarti terdapat lebih dari satu milyar wanita di dunia yang pernah mengalami kekerasan. OBR mengawali gerakannya pada bulan Februari, tepatnya pada *valentine day's* di tahun 2023. Gerakan pertamanya diawali dengan melakukan aksi massa dengan cara melakukan demonstrasi dan menari untuk mengekspresikan kemarahan mereka atas ketidakadilan yang dialami oleh wanita dan mendesak agar kekerasan terhadap wanita harus segera diselesaikan. Dilanjutkan pada tahun 2014, OBR membuat gerakan “*One Billion Rising for Justice*” yang memiliki tema “Revolusi” dimana gerakan ini menyorot masalah-masalah keadilan yang dialami oleh semua korban kekerasan berbasis gender. Selain itu, OBR juga menyoroti dampak-dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan, perang, rasisme, imperialisme, patriarki, dan kapitalisme. Gerakan yang dilaksanakan pada tahun ini berbentuk tuntutan keadilan, berupaya untuk membangun komunitas besar di seluruh di dunia dan ingin mencari tahu akar dari penyebab kekerasan pada wanita di dunia. Pada tahun 2015, OBR berhasil mengumpulkan jutaan aktivis yang berasal dari 200 negara dan merupakan gerakan revolusi lanjutan yang bertujuan untuk mengubah paradigma, menuntut adanya tanggung jawab, keadilan, dan perubahan sistem (Rising, 2021).

Gerakan revolusi masih terus berlanjut di tahun 2016. Fokus gerakan OBR tahun ini pada wanita-wanita yang terpinggirkan yang menjadi perhatian nasional hingga internasional. Di tahun ini, OBR berupaya untuk membawa energi baru, memperkuat seruannya untuk mengubah sistem demi mengakhiri kekerasan wanita, dan memanggil lebih banyak masyarakat lain untuk membantu wanita lain untuk bangkit. Di tahun 2017, OBR membuat gerakan “*Rising for Solidarity*”. Mengingat kembali bahwa akar penyebab kekerasan pada wanita disebabkan oleh adanya struktur patriarki yang terus menerus tertanam pada masyarakat sehingga membawa wanita pada eksploitasi dan penindasan. Gerakan ini bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk eksploitasi pada wanita seperti, dehumanisasi tubuh wanita untuk meraih keuntungan, penjualan wanita untuk menjadi tenaga kerja, dan eksploitasi lainnya yang menyerang seluruh wanita terutama wanita pinggiran dan imigran. Pada tahun 2018, gerakan OBR disebut sebagai “*Rise, Resist, and Unite*” yang muncul diakibatkan adanya fasisme,

imperialisme, serangan neoliberal ditambah munculnya pemimpin atau pemerintahan yang anti-wanita sehingga banyak wanita yang terkena dampaknya dimana mereka mendapatkan serangan kesejahteraan, hak, dan rumah mereka. Dilanjutkan pada tahun 2019, OBR memperkenalkan “*Rising: From a Campaign to a Way of Life*” yang berfokus untuk memperluas pemahaman seluruh masyarakat tentang penindasan dan eksploitasi wanita pada kapitalisme, kolonialisme, rasisme, imperialisme, lingkungan dan perang, OBR mengajak seluruh masyarakat untuk menelusuri lebih dalam, mempelajari, mendengarkan, menyadari, dan mengambil tindakan untuk keluar dari zona nyaman fisik dan intelektual sehingga konsep “bangkit” bukan hanya sekedar kampanye tetapi gaya hidup. Di tahun 2020, gerakan OBR diberi nama “*2020: Rise the Vibration, Rise for Revolution*”. Gerakan ini mengajak masyarakat dunia untuk tetap dapat melakukan tindakan agar tidak tenggelam dalam sinisme, kebencian, dan kehancuran mereka. Tahun 2021 gerakan OBR disebut sebagai “Rising Garden”. Gerakan ini beranjak dari adanya kekerasan berbasis gender yang sejalan dengan penghancuran bumi sehingga tujuan dari gerakan ini adalah melindungi wanita dan bumi agar kehidupan di masa depan akan tetap ada (Rising, 2021).

B. Rumusan Masalah

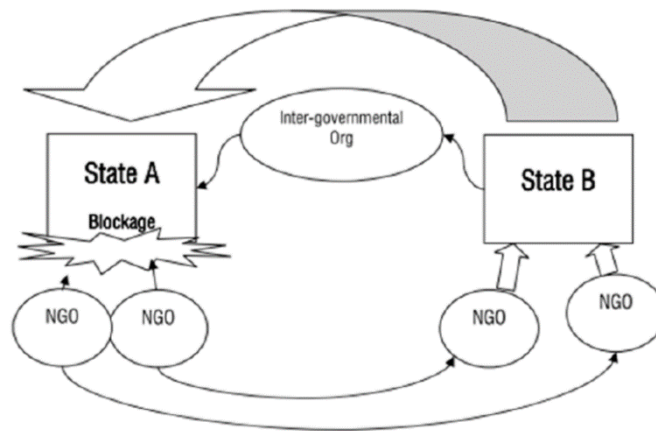
Bagaimana Strategi Advokasi *One Billion Rising* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Wanita di Afghanistan?

C. Kerangka Pemikiran

1 Konsep Transnational Advocacy Networks

Transnational Advocacy Networks (TANs) merupakan jaringan para aktivis advokasi yang melibatkan lebih dari dua negara untuk bekerjasama dalam mencapai suatu kepentingan atau tujuan bersama. *Transnasional Advokasi Network* juga merupakan aktivis advokasi dari suatu negara yang telah membentuk jaringan dengan aktivis advokasi di negara lain. Jaringan aktivis yang berkoalisi ini nantinya beroperasi dengan berperan sebagai kelompok penekan. Aktivis advokasi dalam jaringan ini dapat berupa NGO, kaum intelektual, Gerakan sosial, media massa, politisi, bahkan pejabat di dalam negeri maupun luar negeri. Isu advokasi yang dilakukan oleh TANs biasanya adalah isu Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, dan lingkungan hidup (Azizah, 2014). Di dalam TANs terdapat model *Boomerang Pattern* merupakan usaha yang dilakukan oleh NGO demi mendapatkan perhatian internasional sehingga dapat membantu dalam memenuhi apa yang menjadi tujuan utamanya. Tujuannya dilakukannya untuk memperkuat jaringan NGO saat mengalami kebuntuan. Harapannya penguatan jaringan yang dilakukan oleh NGO lokal bersama dengan NGO internasional mampu memberikan tekanan bagi pemerintah untuk melakukan apa yang diharapkan oleh NGO lokal tersebut. jika sebuah NGO sudah tidak

dapat lagi menyelesaikan isu domestik di negaranya, NGO tersebut dapat membentuk jaringan dengan NGO di luar negeri. Jaringan ini nantinya digunakan untuk melakukan pertukaran informasi, bantuan advokasi, hingga bantuan finansial (Kristanti,2021).



Gambar 1. *Boomerang Pattern*

Sumber: Keck and Sikkink

Pola *boomerang pattern* ini, akan terjadi apabila kelompok lokal ataupun individu memiliki permasalahan tertentu, namun pemerintah tidak memiliki respon yang baik terhadap kondisi mereka, maka dari itu mereka mencari koneksi internasional. Tujuannya adalah memperkuat klaim mereka agar dapat menekan pemerintahan tersebut dari luar. *Boomerang pattern* ini terjadi ketika terputusnya saluran antara pemerintah dan masyarakat domestik sehingga mereka tidak mendapatkan akses ke institusi politik mengenai suatu permasalahan. Pola ini, menggambarkan hubungan dan pertukaran antar aktor dalam jaringan advokasi internasional. Ketika suatu pemerintah melanggar atau menolak dalam mengakui hak-hak individu dan kelompok di negaranya, aktivis atau NGO akan mencari perhatian internasional dalam menyuarakan keprihatinan mereka dan upaya dalam melindungi hak-hak mereka. Mereka juga akan memberikan tekanan kepada pemerintah dengan cara mencari hubungan luar negeri apabila terdapat larangan dalam menyuarakan keluhan-keluhan mereka. Terciptanya jaringan ini sangat penting bagi NGO yang belum memiliki pendanaan yang cukup. Hal ini dikarenakan TAN memberikan akses, pengaruh, pengaruh, hingga pendanaan.

Menurut Keck and Sikkink di dalam bukunya yang berjudul “*Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*”, terdapat 4 strategi advokasi yang meliputi :

a. *Information Politics.*

Information Politics merupakan strategi advokasi yang mengacu pada kemampuan untuk menggunakan atau mencari informasi kredibel sehingga dapat disebarkan kembali dan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan. Dalam hal ini, aktor-aktor meningkatkan pengaruhnya dengan cara menyajikan informasi berbentuk fakta atau testimoni yang dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang disajikan ini, nantinya akan ada dilakukan terlebih dahulu framing isu dengan tujuan meyakinkan masyarakat sehingga dapat meyakinkan khalayak luas. Framing isu ini, juga bertujuan agar isu yang dibawa akan mudah dipahami oleh target audiens, menarik perhatian dan mendorong aksi, serta menarik perhatian institusi lainnya yang tepat dalam menangani isu tersebut (Kristina Sianturi & Khurun'in, 2020).

b. *Symbolic Politics.*

Symbolic Politics merupakan strategi yang digunakan oleh aktor *Transnational Advocacy Networks* dengan cara membingkai isu dalam bentuk simbol, aksi, ataupun cerita yang bertujuan untuk mempercepat mengembangkan jaringan advokasi. Aksi yang dilakukan dapat berbentuk aksi yang berskala besar ataupun rutin dilakukan sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, *Symbolic Politics* ini merupakan bentuk dari persuasi yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan peningkatan pengaruh mereka. Strategi ini juga dapat berbentuk penetapan hati peringatan kejadian atau hari-hari istimewa yang terkait dengan isu yang diperjuangkan sehingga Masyarakat selalu ingat dan memperhatikan isu tersebut (Albertus, 2021).

c. *Leverage Politics.*

Strategi *Leverage Politics* merupakan strategi advokasi yang memerlukan bantuan dari aktor lainnya yang memiliki power yang lebih kuat agar dapat mempengaruhi atau mengubah situasi kebijakan di negara target. Strategi ini terbagi lagi menjadi dua, yang meliputi *material leverage* dan *moral leverage*. Dalam *material leverage*, merupakan bentuk usaha agar dapat memperoleh dana atau bantuan material, seperti Kerjasama diplomatik ataupun bantuan ekonomi. Selain itu, juga dapat berbentuk voting dari lembaga internasional atau bantuan lainnya. Sedangkan, *moral leverage* merupakan usaha dari aktor advokasi agar mendapatkan dukungan moral dari aktor yang memiliki power lebih tinggi sehingga negara target

dapat menjadi sorotan atau perhatian dunia internasional. Dengan adanya dukungan moral dari aktor yang memiliki pengaruh besar ini, dapat dipertimbangkan menjadi power dalam menunjukkan bahwasannya negara/aktor target telah melanggar kesepakatan internasional (Virgy et al., 2020).

d. *Accountability Politics*.

Accountability Politics merupakan upaya yang dilakukan oleh aktor advokasi agar pemerintah atau aktor yang kuat di negara target terus menerus mempertanggungjawabkan atau norma yang telah disetujui. Strategi ini, juga menekan pemerintah melalui norma-norma internasional karena pemerintah seringkali tidak konsisten dan menyetujui perubahan kebijakan. Apabila, pemerintah telah menyetujui suatu norma internasional ini, maka aktor advokasi akan langsung mengingatkannya agar tetap konsisten (Albertus, 2021).

Dalam konteks ini, *One Billion Rising* menerapkan tiga strategi dalam upayanya untuk mengatasi kekerasan Wanita di Afghanistan. Hal tersebut meliputi *Information Politics*, *Symbolics Politics*, dan *Leverage Politics*. Dalam *Information Politics* yang merupakan strategi melakukan framing isu lalu kemudian menyebarkannya untuk menarik perhatian internasional. *One Billion Rising* memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu sosial media yang meliputi Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube yang dimilikinya untuk menyebarkan informasi-informasi terbaru terkait kondisi Wanita di Afghanistan sekaligus sebagai sarana kampanyenya dalam upayanya menarik perhatian internasional. Dalam hal *Symbolic Politics* yang merupakan strategi membingkai isu dalam bentuk simbol, aksi, ataupun cerita *One Billion Rising* membuat aksi kampanye dengan menampilkan seni dalam bentuk tarian massa yang bertujuan untuk menekan kebijakan pemerintah negara target. Tarian digunakan sebagai aksi simboliknya dikarenakan *One Billion Rising* dan banyak wanita yang menilai bahwasannya tarian merupakan suatu tindakan yang membebaskan wanita dalam berekspresi dan memberdayakan wanita. Terakhir, mengenai *Leverage Politics* yang merupakan strategi untuk melibatkan bantuan dari aktor lain yang lebih kuat agar dapat mempengaruhi atau mengubah situasi kebijakan di negara target ini *One Billion Rising* melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi di bidang feminis dan HAM yang ada di seluruh negara.

D. Hipotesa

Berdasarkan konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara Strategi Advokasi *One Billion Rising* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Wanita di Afghanistan:

1. Melalui *Information Politics*, *One Billion Rising* memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan informasi mengenai kasus kekerasan wanita di Afghanistan.
2. Melalui *Symbolic Politics*, *One Billion Rising* menggunakan tarian massa dan penetapan hari peringatan sebagai simbolic untuk menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan wanita di Afghanistan.
3. Melalui *Leverage Politics*, *One Billion Rising* berkoneksi dengan organisasi internasional lainnya untuk mendukung mereka dalam mengatasi kekerasan terhadap wanita.

E. Metode Penelitian

Sebagai upaya dalam menjawab rumusan masalah penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Arikunto,2006) penelitian kualitatif bersifat deskriptif dikarenakan cenderung menggambarkan suatu situasi dengan akurat dan sistematis. Penelitian ini lebih menonjolkan suatu perspektif dari subjek penelitian dengan menggunakan landasan teori-teori yang ada agar sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Landasan teori inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai latar belakang penelitian dan sebagai bahan pendukung di bagian pembahasan penelitian. Menurut (Moleong, 2013) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya untuk memahami fenomena terkait apa yang sedang terjadi oleh subjek penelitian yang dapat meliputi aktor, tindakan,dan lain sebagainya. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami makna dari data dan menemukan kebenaran empiris, logis, ataupun teoritis (Waris, 2022).

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Advokasi *One Billion Rising* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Wanita di Afghanistan, kemudian memahami bagaimana pengaruh advokasi yang dilakukan terhadap kasus tersebut.

G. Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk mencegah terjadinya perluasan pembahasan agar objek penelitian dapat lebih spesifik sehingga dapat membantu pembuktian mengenai pokok pembahasan. Di dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai kasus yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2021-2023.

H. Sistematika Kepenulisan

Untuk memahami isi dari keseluruhan penelitian, maka penulis membuat kedalam :

BAB I : Penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah yang menjadi alasan kenapa isu ini perlu diteliti. Selanjutnya dilanjutkan dengan perumusan masalah, kerangka teori yang digunakan, Metode Penelitian, Batasan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Penulis akan membahas mengenai awal mula masuknya Taliban yang merupakan akar dari kasus kekerasan Wanita di Afghanistan.

BAB III: Penulis akan membahas mengenai awal mula masuknya *One Billion Rising* ke Afghanistan dan upaya dari *One Billion Rising* untuk menegakkan Hak Asasi Manusia terhadap kekerasan wanita di Afghanistan melalui kerangka teori *Transnational Advocacy Network* yang terdiri dari *information politics, symbolic politic, dan leverage politics*.

BAB IV: Penulis akan memberikan kesimpulan yang berisikan analisa dan poin penting dari bab-bab sebelumnya mengenai advokasi yang dilakukan oleh *One Billion Rising* dalam menangani kasus kekerasan wanita di Afghanistan.